



RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB TAHUN 2023



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2022**

HALAMAN VERIFIKASI

Rencana Kerja
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2023

Catatan :

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Renja tersebut berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, dan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Sidenreng Rappang, Maret 2022
Kepala Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Sidenreng Rappang,

DR. Ns. H. BASRA, S.Kep, M. Kes

Pangkat : Pembina TK.1

NIP: 19701202 1991031 005



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A. No. 2 Kabupaten Sidenreng Rappang
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 80/ /DINKES/2022

TENTANG

RANCANGAN AWAL RENJA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan maksud dan tujuan menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 terutama yang terkait dengan urusan pembangunan bidang kesehatan ke dalam Rencana kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB tahun 2023;
- b. bahwa renja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB tahun 2023 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Renja, RKA/DPA dan sebagai penuntun pencapaian kinerja program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahunnya selama tahun lima tahun ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB tentang renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018, Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
 28. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 301);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2021.

- KESATU : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini diterbitkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KETIGA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang
Pada Tanggal, September 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Sidenreng Rappang,

DR. Ns. H. BASRA, S.Kep, M. Kes
Pangkat : Pembina TK.1
NIP: 19701202 1991031 005

DAFTAR ISI

	Hal
Judul	I
Halaman Verifikasi.....	II
Kata Pengantar.....	III
Keputaus Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 80/ /III/2022/DINKES Tentang Rencana kerja Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Sidenreng rappang tahun 2023.....	IV
Daftar Isi	IX
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang,	1
1.2. Landasan Hukum,	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu.....	13
2.2. Analisa kinerjapelayan PD.....	35
2.3. isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi.....	41
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	43
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.....	54
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	55
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	62
3.3. Program dan Kegiatan.....	69
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	78
BAB V. PENUTUP.	154

BAB I

PENDAHULUAN

RENCANA KERJA

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai kewajiban menyusun dokumen Rancangan awal Renja. Dokumen Rancangan awal Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi

pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan awal Renja akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Sidenreng Rappang dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);

22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 461);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1538);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1619);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
 38. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi

- Sulawesesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 301);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan awal Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun dengan maksud:

- 1) Sebagai bahan perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.
- 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan awal Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah:

- 1) Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2023

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang, proses penyusunan Renja,

keterkaitan antara Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Renja K/L dan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1. 2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang, kewenangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

1. 3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

1. 4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan awal Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2023.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja Bappeda Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2021). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.

2. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang

Berisikan tentang tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan telaah RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3. 1 Telaah terhadap kebijakan nasional

Berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. 2 Tujuan dan sasaran renja PD

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3. 3 Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

RENCANA KERJA

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2023**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2023.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam evaluasi adalah:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi setiap program/kegiatan berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel T-C.2.9 berikut ini.

Table T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	0	100	84,19	84,19	100	84,19	84,19
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kelengkapan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	0	100	90,57	90,57	100	90,57	35.60
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	0	100	70,89	70,89	100	70,89	70,89
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	100	0	100	93,29	93,29	100	93,29	93,29
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	100	0	100	88,94	88,94	100	88,94	88,94
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia	100	0	100	73,33	73,33	100	73,33	73,33
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD yang tersedia	100	0	100	32,92	32,92	100	32,92	32,92
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersedia	100	0	100	75,75	75,75	100	75,75	75,75
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	100	0	100	37,20	37,20	100	37,20	37,20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	100	0	100	49,38	49,38	100	49,38	49,38
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	0	100	94,12	94,12	100	94,12	94,12
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	100	0	100	99,61	99,61	100	99,61	99,61
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersedia	100	0	100	37,43	37,43	100	37,43	37,43
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersedia	100	0	100	99,99	99,99	100	99,99	99,99
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Daftar inventaris Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	0	100	80,44	80,44	100	80,44	80,44
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	0	100	80,44	80,44	100	80,44	80,44
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan sarana dan Prasarana Kepegawaian Perangkat Daerah	100	0	100	77,68	77,68	100	77,68	77,68
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Tim penilaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang dilaksanakan	100	0	100	93,21	93,21	100	93,21	93,21
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang di sosialisasikan	100	0	100	77,37	77,37	100	77,37	77,37

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk kepentingan administrasi Kantor	100	0	100	89,53	89,53	100	89,53	89,53
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	100	0	100	79,86	79,86	100	79,86	79,86
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100	0	100	83,20	83,20	100	83,20	83,20
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	100	0	100	100	100	100	100	100
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	100	0	100	92,20	92,20	100	92,20	92,20
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersedia	100	0	100	57,51	57,51	100	57,51	57,51
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia	100	0	100	91,41	91,41	100	91,41	91,41
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	0	100	70,77	70,77	100	70,77	70,77
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor	100	0	100	86,20	86,20	100	86,20	86,20
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	0	100	69,55	69,55	100	69,55	69,55

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Aset Pemerintah Daerah	100	0	100	74,54	74,54	100	74,54	74,54
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mendapatkan Anggaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Selama Satu tahun	100	0	100	66,07	66,07	100	66,07	66,07
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	100	0	100	98,17	98,17	100	98,17	98,17
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Biaya Pemeliharaan	100	0	100	99,23	99,23	100	99,23	99,23
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapat biaya pemeliharaan/Rehabilitasi	100	0	100	45,01	45,01	100	45,01	45,01
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi	100	0	100	3,61	3,61	100	3,61	3,61

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	100	0	100	89,53	89,53	100	89,53	89,53
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia	100	0	100	91,36	91,36	100	91,36	91,36
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang terbangun	100	0	100	0	83,20	100	83,20	83,20
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terbangun	100	0	100	99,9	100	100	100	100
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di bangun	100	0	100	56,03	92,20	100	92,20	92,20
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	100	0	100	100,00	57,51	100	57,51	57,51
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia	100	0	100	99,93	91,41	100	91,41	91,41
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat tambahan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	0	100	95,69	70,77	100	70,77	70,77
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Jenis Obat dan Vaksin yang tersedia	100	0	100	89,56	86,20	100	86,20	86,20
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis Bahan Habis Pakai yang tersedia	100	0	100	85,78	69,55	100	69,55	69,55

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/Alat Penunjang Medik	100	0	100	67,45	67,45	100	67,45	67,45
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	0	100	70,79	70,79	100	70,79	70,79
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	0	100	98,51	98,51	100	98,51	98,51
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	0	100	14,98	14,98	100	14,98	14,98
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	0	100	41,89	41,89	100	41,89	41,89
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	0	100	96,25	96,25	100	96,25	96,25
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	0	100	55,71	55,71	100	55,71	55,71
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	0	100	97,10	97,10	100	97,10	97,10
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk Usia Lanjut yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	0	100	98,68	98,68	100	98,68	98,68

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	0	100	0	0	100	0	0
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	0	100	99,04	99,04	100	99,04	99,04
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	0	100	17,32	17,32	100	17,32	17,32
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	0	100	6,04	6,04	100	6,04	6,04
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	0	100	2,26	2,26	100	2,26	2,26
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Puskesmas pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang melakukan Pelayanan Kesehatan	100	0	100	0	0	100	0	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	100	0	100	92,52	92,52	100	92,52	92,52
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pos UKK yang terbentuk Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga	100	0	100	59,01	59,01	100	59,01	59,01

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-Jumlah desa/kelurahan STBM - Jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis -Jumlah penduduk yang menggunakan air minum sehat	100	0	100	93,27	93,27	100	93,27	93,27
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Rumah tangga berperilaku Hidup bersih dan sehat	100	0	100	86,85	86,85	100	86,85	86,85
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	100	0	100	98,61	98,61	100	98,61	98,61
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	0	100	69,01	69,01	100	69,01	69,01
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang dengan masalah jiwa dan NAPZA mendapat pelayanan kesehatan	100	0	100	94,80	94,80	100	94,80	94,80
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	100	0	100	93,52	93,52	100	93,52	93,52
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	0	100	78,42	78,42	100	78,42	78,42
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	0	100	93,78	93,78	100	93,78	93,78

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang mendapatkan pemeriksaan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	100	0	100	100	100	100	100	100
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Puskesmas yang melakukan pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100	0	100	0	0	100	0	0
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan yang menyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100	0	100	98,76	98,76	100	98,76	98,76
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapat biaya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	0	100	0	0	100	0	0
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan/Puskesmas di Kabupaten yang sudah terakreditasi	100	0	100	0	0	100	0	0
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Puseksmas yang melakukan investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	0	100	35,42	35,42	100	35,42	35,42
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100	0	100	59,69	59,69	100	59,69	59,69

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100	0	100	91	91	100	91	91
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	0	100	91	91	100	91	91
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan	100	0	100	80.59	80.59	100	80.59	80.59
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR di fasilitas mendapatkan SIP	100	0	100	97.71	97.71	100	97.71	97.71
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100	0	100	97,71	97,71	100	97,71	97,71
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	0	100	83.52	83.52	100	83.52	83.52
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang di butuhkan dalam rangka distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan di fasilitas kesehatan	100	0	100	83,52	83,52	100	83,52	83,52

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	0	100	78.78	78.78	100	78.78	78.78
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	0	100	78,78	78,78	100	78,78	78,78
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	100	0	100	36.05	36.05	100	36.05	36.05
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	100	0	100	91.97	91.97	100	91.97	91.97
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	100	0	100	91,97	91,97	100	91,97	91,97

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapat sertifikat	100	0	100	5.51	5.51	100	5.51	5.51
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Pengendalian serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat	100	0	100	5,51	5,51	100	5,51	5,51
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat tindak lanjut pengawasan perizinan	100	0	100	42.55	42.55	100	42.55	42.55
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang mendapat pemeriksaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	100	0	100	42.55	42.55	100	42.55	42.55
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	100	0	100	41.02	41.02	100	41.02	41.02
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Puskesmas yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	0	100	98.25	98.25	100	98.25	98.25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	0	100	98.25	98.25	100	98.25	98.25
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah tangga yang menyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat	100	0	100	96.06	96.06	100	96.06	96.06
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Rumah tangga yang menyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat	100	0	100	96.06	83,20	100	83,20	83,20
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	0	100	0.73	100	100	100	100
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	0	100	0.73	92,20	100	92,20	92,20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		100	0	100	69,17	69,17	100	69,17	69,17
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	100	0	100	79,86	79,86	100	79,86	79,86
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan OPD yang terlibat dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	100	0	100	83,20	83,20	100	83,20	83,20
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah OPD yang terlibat dalam Keserasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	100	0	100	100	100	100	100	100
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terlibat dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	100	0	100	92,20	92,20	100	92,20	92,20
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten	100	0	100	57,51	57,51	100	57,51	57,51
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah OPD yang terlibat dalam Perumusan Parameter Kependudukan	100	0	100	91,41	91,41	100	91,41	91,41

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Penyediaan dokumen Data Kependudukan yang tersedia	100	0	100	89,53	89,53	100	89,53	89,53
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang tersedia	100	0	100	79,86	79,86	100	79,86	79,86
2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan yang tersedia	100	0	100	83,20	83,20	100	83,20	83,20
			100	0	100	100	100	100	100	100
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Ratio Akseptor KB	100	0	100	85.81	85.81	100	85.81	85.81
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100	0	100	82.29	82.29	100	82.29	82.29
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Balai KB yang memberikan advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100	0	100	71,94	71,94	100	71,94	71,94
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Balai KB yang memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	100	0	100	99,65	99,65	100	99,65	99,65
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Balai KB yang menerima KIE Program KKBPK	100	0	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang melaksanakan pembinaan IMP dan Program KKBPK	100	0	100	98.62	98.62	100	98.62	98.62
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah PKB PLKB melakukan Pembinaan oleh penyuluh Lapangan KB (PLKB) terhadap kader IMP dan Program KKBPK	100	0	100	97,04	97,04	100	97,04	97,04
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Balai KB yang mendapatkan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	100	0	100	99,88	99,88	100	99,88	99,88
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB yang mendapatkan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang dimanfaatkan dalam Program KKBPK	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	cakupan fasilitas kesehatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100	0	100	78.28	78.28	100	78.28	78.28

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100	0	100	38,97	38,97	100	38,97	38,97
2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang diberikan penyuluhan untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang mendapatkan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100	0	100	100	100	100	100	100
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100	0	100	0	0	100	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan yang mendapatkan Peningkatan kompetensi SDM Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak Hak Reproduksi	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Faskes yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi & SDM Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Faskes yang mendapatkan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	100	0	100	73,72	73,72	100	73,72	73,72
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Balai KB yang memberikan penyuluhan Kesertaan KB Pria (MOP)	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	Cakupan Kader yang ikut dalam Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	100	0	100	80.58	80.58	100	80.58	80.58
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB Yang di jadikan lokasi pembinaan Terpadu Kampung KB	100	0	100	80,58	80,58	100	80,58	80,58

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	100	0	100	86.72	86.72	100	86.72	86.72
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan desa/Kelurahan yang ikut dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	0	100	86.72	86.72	100	86.72	86.72
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah desa/kelurahan membentuk kelompok tribina dan UPPKS	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang di tempati pelaksanaan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan keluarga & UPPKS	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Kelompok yang di tempati pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Klg)	100	0	100	0	0	100	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi IPK	100	0	100	100	100	100	100	100
2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah kecamatan yang melakukan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	100	0	100	55	55	100	55	55

Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang sampai akhir Desember 2021, semua program/kegiatan yang dilaksanakan sudah memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana serta pengelolaan anggaran program dan kegiatan. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan.

Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan kinerja perangkat daerah tersebut meliputi:

1. Terpenuhinya administrasi perkantoran setiap bulan.
2. Terpenuhinya sarpras sesuai kebutuhan.
3. Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD.
4. Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan
5. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun
6. Persentase Ketersediaan Obat essensial di puskesmas
7. Indeks Keluarga Sehat (RPJMD)
8. Persentase Sarana Prasarana, Distribusi, Sediaan Farmasi, Perbekalan kesehatan dan produksi pangan sesuai standar.
9. Persentase Posyandu Strata Purnama dan Mandiri

10. Persentase PHBS Rumah Tangga Strata Utama dan Paripurna (RPJMD)
11. Persentase PHBS Institusi Pendidikan Strata Utama dan Paripurna
12. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
13. Persentase Balita Gizi buruk tertangani (RPJMD)
14. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan 5 Pilar STBM (RPJMD)
15. Persentase TPM yang memperoleh Sertifikat Laik Syarat Kesehatan
16. Persentase Tempat-tempat umum yang dibina
17. Jumlah puskesmas terakreditasi;
18. Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
19. Persentase masyarakat miskin sakit yang tertangani di FKTP (RPJMD)
20. Persentase fasilitas bangunan, sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya sesuai standar permenkes 75/2014
21. Persentase masyarakat miskin sakit yang tertangani di FKTR
22. Persentase Lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
23. Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar (SPM)
24. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)
25. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
26. Persentase Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
27. Persentase Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas (SIMPUS)
28. Proporsi Penderita DBD yang ditangani (RPJMD)
29. Persentase bayi yang memperoleh imunisasi dasar lengkap (RPJMD)
30. Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif minimal 85% (RPJMD)
31. Persentase Terduga TB Paru yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)

32. Persentase angka kasus HIV yang diobati (RPJMD)
33. Persentase penderita HIV yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
34. Cakupan penemuan suspek Acute Flaccid Paralysis (Surveilans AFP) atau lumpuh layuh mendadak bukan karena ruda paksa dan usia dibawah 15 tahun (RPJMD)
35. Proporsi penderita malaria yang diobati (RPJMD)
36. Persentase orang dengan penyakit HT yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (RPJMD, SPM)
37. Persentase orang dengan penyakit DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (RPJMD, SPM)
38. Persentase Orang usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
39. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa berat (ODGJ) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sehingga pencapaian kinerjanya diukur melalui pencapaian SPM. Tabel 2.2 menggambarkan secara rinci mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	8		9	10	11	12	13
	SPM BIDANG KESEHATAN													
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		100%	100%	100%	100%	100%	80,0	84,36	92,63	100%	100%	
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%		100%	100%	100%	100%	100%	97,8	92,11	100	100%	100%	
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100	100,	100	100%	100%	
4	Cakupan pelayanan Kesehatan Balita	100%		100%	100%	100%	100%	100%	88	86,4	100	100%	100%	
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100	49,66	99,39	100%	100%	
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%		100%	100%	100%	100%	100%	65,8	39,60	77,47	100%	100%	
7	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%		100%	100%	100%	100%	100%	61,7	58,07	51,73	100%	100%	
8	Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	63,3	19,22	65,28	100%	100%	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%		100%	100%	100%	100%	100%	98,1	36,05	66,56	100%	100%	
10	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	73,6	86,18	91,15	100%	100%	
11	Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	71,6	46,94	82,23	100%	100%	
12	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/	100%		100%	100%	100%	100%	100%	92,7	76,50	96,76	100%	100%	

Tabel T-C.30.a
ANALISIS CAPAIAN KINERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Urusan Bid. Kesehatan)		1. Indeks Kesehatan	76,97	76,94	99,96
	1. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	2. Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	21	7	33,33
		3. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	19,5	4,5	23,08
		4. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	< 1	0,1	11,11
		5. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	330	136	41,21
		6. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	100	100	100
		7. Indeks Kepuasan masyarakat (%)	77,14	76,61	99,31
2. Terwujudnya keluarga sejahtera . (Urusan Bid. Dalduk dan KB)		8. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	2,08	2,14	100
	2. Menurunnya Angka Kelahiran Total	9. Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	2,2	2,14	100
	3. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern	10. Ratio Akseptor KB	55,30	76,81	96,01

Tabel T-C.30. b
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi				Capaian (%)			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1. Indeks Kesehatan	Indeks	75,62	76,29	76,66	76,94	98,01	98,33	98,81	99,96
2. Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	Kasus	2	4	6	7	39,08	37,21	35,46	33,33
3. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	Per 1000 kelahiran	3,5	4	3,8	4,5	22,45	23,00	22,83	23,08
4. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	Per 1000 Penduduk	0,003	0,01	0,05	0,1	9,05	10,00	10,45	11,11
5. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	256	202	121	136	61,01	58,22	35,21	41,21
6. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7. Indeks Kepuasan masyarakat (%)	%	-	75,1	76,61	76,61	-	99,1	99,45	99,31
8. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	%	2,14	2,28	2,16	2,14	97,27	97,02	97,46	100
9. Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	Anak/ Keluarga	2,14	2,28	2,16	2,14	97,27	97,02	97,46	100
10. Ratio Akseptor KB	%	79,75	77,75	76,25	76,81	99,77	99,01	99,34	96,01

Sumber Data : Perubahan RENSTRA 2018-2023 Dinkes, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari beberapa isu yang saat ini berkembang, ada beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan sektor kesehatan, yang harus menjadi perhatian Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penentuan strategis dan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rumusan isu – isu di bidang kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja dan lansia
2. Peningkatan program pengendalian masalah kesehatan ibu, anak dan remaja
3. Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
4. Peningkatan kemitraan swasta, peran lintas sektor dan pelayanan gizi masyarakat (posyandu, poskestren, poskesdes, dll)
5. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
6. Peningkatan penanganan dan pengendalian bencana dan kejadian luar biasa (KLB)
7. Peningkatan akses air minum dan sanitasi berkualitas dan memenuhi syarat
8. Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) melalui penerapan 5 pilar
9. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit bersumber binatang
10. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan imunisasi
11. Peningkatan pengawasan dan pembinaan TTU/TPM
12. Peningkatan ketersediaan, pemerataan keterjangkauan obat dan alkes
13. Peningkatan pelayanan kefarmasian yang efektif dan efisien termasuk penggunaan obat yang rasional
14. Peningkatan pengawasan obat, alkes, PKRT, obat tradisional, kosmetik dan makanan yang beredar termasuk pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
15. Peningkatan pengawasan upaya kesehatan tradisional dan pengembangan obat asli Indonesia
16. Peningkatan Capaian PHBS , Sekolah, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Sarana Kesehatan

17. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama upaya kesehatan berbasis masyarakat, kemitraan swasta dan peran lintas sektor
18. Pengembangan JKN melalui :
 - a. Peningkatan Fasyankes.
 - b. Pemenuhan SDM kesehatan baik kualitas maupun kuantitas dan distribusinya.
19. Perbaikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan
20. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan rujukan
21. Peningkatan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas dan merata
22. Peningkatan manajemen dan system informasi kesehatan
23. Peningkatan upaya pelaksanaan jaminan kesehatan nasional
24. Peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan jiwa
25. Penurunan jumlah rata – rata anak perkeluarga menjadi 2 orang
26. Mengatur jarak kelahiran pada masyarakat
27. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur

Berdasarkan isu – isu tersebut dapat dijadikan sebagai isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, kemitraan swasta dan peran lintas sektor dalam pelayanan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta peningkatan capaian PHBS.
2. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta penanganan Bencana/KLB, Kesehatan Matra dan Surveilas epidemiology dan Kualitas air minum.
3. Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan pembinaan / pengawasan TTU/TPM
4. Peningkatan ketersediaan obat, alkes dan pengawasan sediaan farmasi, alkes, PKRT, dan makanan, serta upaya kesehatan tradisional dan pengembangan obat asli Indonesia
5. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur
6. Pengembangan JKN melalui :
 - a. Peningkatan fasilitas yankes dan kualitas pelayanan yang menyeluruh
 - b. Peningkatan SDM Kesehatan yang berkualitas dan merata
 - c. Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan secara menyeluruh
- 7. Peningkatan manajemen dan sistem informasi kesehatan serta sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	REALISASI CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kelengkapan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			52.257.916.794	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kelengkapan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			52.257.916.794	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.430.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.430.300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	6.180.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	6.180.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	6.000.000	

NO	REALISASI CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	11.250.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	11.250.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sidenreng Rappang	100%	46.285.758.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sidenreng Rappang	100%	46.285.758.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	46.236.365.100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	46.236.365.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	3.700.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	3.700.200	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	1.500.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	1.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	44.192.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	44.192.700	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Daftar inventaris Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sidenreng Rappang	100%	9.482.600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Daftar inventaris Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sidenreng Rappang	100%	9.482.600	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sidenreng Rappang	100%	1.475.600	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sidenreng Rappang	100%	1.475.600	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersdia	Sidenreng Rappang	100%	4.950.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersdia	Sidenreng Rappang	100%	4.950.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sidenreng Rappang	100%	3.057.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sidenreng Rappang	100%	3.057.000	

NO	REALISASI CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan sarana dan Prasarana Kepegawaian Perangkat Daerah	Sidenreng Rappang	100%	150.027.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan sarana dan Prasarana Kepegawaian Perangkat Daerah	Sidenreng Rappang	100%	150.027.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang di sosialisasikan	Sidenreng Rappang	100%	150.027.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang di sosialisasikan	Sidenreng Rappang	100%	150.027.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk kepentingan administrasi Kantor	Sidenreng Rappang	100%	171.414.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk kepentingan administrasi Kantor	Sidenreng Rappang	100%	171.414.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	8.940.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	8.940.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	147.440.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	147.440.900	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	7.936.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	7.936.600	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	7.097.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	7.097.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	315.550.300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	315.550.300	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sidenreng Rappang	100%	5.117.580.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sidenreng Rappang	100%	5.117.580.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor	Sidenreng Rappang	100%	643.280.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor	Sidenreng Rappang	100%	643.280.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sidenreng Rappang	100%	4.474.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sidenreng Rappang	100%	4.474.300.000	

NO	REALISASI CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Aset Pemerintah Daerah	Sidenreng Rappang	100%	484.220.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Aset Pemerintah Daerah	Sidenreng Rappang	100%	484.220.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mendapatkan Anggaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Selama Satu tahun	Sidenreng Rappang	100%	172.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mendapatkan Anggaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Selama Satu tahun	Sidenreng Rappang	100%	172.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Sidenreng Rappang	100%	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Sidenreng Rappang	100%	25.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Biaya Pemeliharaan	Sidenreng Rappang	100%	88.876.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Biaya Pemeliharaan	Sidenreng Rappang	100%	88.876.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapat biaya pemeliharaan/Rehabilitasi	Sidenreng Rappang	100%	185.780.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapat biaya pemeliharaan/Rehabilitasi	Sidenreng Rappang	100%	185.780.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Sidenreng Rappang	100%	12.064.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Sidenreng Rappang	100%	12.064.000	

NO	REALISASI CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		100%	47.600.006.919	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		100%	47.600.006.919	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia		100%	37.052.239.819	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia		100%	37.052.239.819	
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang terbangun	Kec. Dua Pitue	1 Unit	5.496.456.000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang terbangun	Kec. Dua Pitue	1 Unit	15.496.456.000	
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terbangun	Sidenreng Rappang	3 Unit	3.408.851.800	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terbangun	Sidenreng Rappang	3 Unit	3.408.851.800	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di bangun	Sidenreng Rappang	1 unit	460.243.850	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di bangun	Sidenreng Rappang	1 unit	460.243.850	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	Sidenreng Rappang	3 Unit	752.911.000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	Sidenreng Rappang	3 Unit	752.911.000	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia	Sidenreng Rappang	5 ipal	6.042.750.000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia	Sidenreng Rappang	5 ipal	6.042.750.000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat tambahan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sidenreng Rappang	14 PKM	5.798.271.234	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat tambahan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sidenreng Rappang	14 PKM	5.798.271.234	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Jenis Obat dan Vaksin yang tersedia	Sidenreng Rappang	130 Jenis Obat	3.060.623.900	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Jenis Obat dan Vaksin yang tersedia	Sidenreng Rappang	130 Jenis Obat	3.060.623.900	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis Bahan Habis Pakai yang tersedia	Sidenreng Rappang	25 Jenis BHP	1.995.862.035	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis Bahan Habis Pakai yang tersedia	Sidenreng Rappang	25 Jenis BHP	1.995.862.035	

NO	REALISASI CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sidenreng Rappang	5 PKM	19.100.000	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	5 PKM	19.100.000	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/Alat Penunjang Medik	Sidenreng Rappang	14 PKM	17.170.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/Alat Penunjang Medik	Kab. Sidenreng Rappang	14 PKM	17.170.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	10.451.842.100	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	10.451.842.100	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	5.945 ibu hamil	55.803.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	5.945 ibu hamil	55.803.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	6.608 Ibu Bersalin	27.747.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	6.608 Ibu Bersalin	27.747.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	5.403 Bayi	10.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	5.403 Bayi	10.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	24.902 Balita	10.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	24.902 Balita	10.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	54.192 siswa	5.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	54.192 siswa	5.000.000	

NO	REALISASI CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	193.400 orang	19.458.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	193.400 orang	19.458.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk Usia Lanjut yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	20.808 Usia Lanjut	555.550.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk Usia Lanjut yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	20.808 Usia Lanjut	555.550.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	17.592 Orang	25.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	17.592 Orang	25.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	2.734 Orang	576.576.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	2.734 Orang	576.576.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	600 Orang	1.910.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	600 Orang	1.910.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	5.725 orang	1.380.326.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	5.725 orang	1.380.326.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	7.677 orang	117.069.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	7.677 orang	117.069.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Puskesmas pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang melakukan Pelayanan Kesehatan	Sidenreng Rappang	14 PKM	10.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Puskesmas pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang melakukan Pelayanan Kesehatan	Sidenreng Rappang	14 PKM	10.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	Sidenreng Rappang	40159 Orang	464.032.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	Sidenreng Rappang	40159 Orang	464.032.200	

NO	REALISASI CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pos UKK yang terbentuk Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	Sidenreng Rappang	55 Pos UKK 14 Puskesmas	23.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pos UKK yang terbentuk Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	Sidenreng Rappang	55 Pos UKK 14 Puskesmas	23.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-Jumlah desa/kelurahan STBM - Jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis -Jumlah penduduk yang menggunakan air minum sehat	Sidenreng Rappang	1 desa 17 fasyankes 270000 jiwa	313.100.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-Jumlah desa/kelurahan STBM - Jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis -Jumlah penduduk yang menggunakan air minum sehat	Sidenreng Rappang	1 desa 17 fasyankes 270000 jiwa	313.100.000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Rumah tangga berperilaku Hidup bersih dan sehat	Sidenreng Rappang	41.483 rumah tangga	471.740.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Rumah tangga berperilaku Hidup bersih dan sehat	Sidenreng Rappang	41.483 rumah tangga	471.740.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Sidenreng Rappang	14 PKM	5.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Sidenreng Rappang	14 PKM	5.000.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Sidenreng Rappang	14 PKM	58.165.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Sidenreng Rappang	14 PKM	58.165.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang dengan masalah jiwa dan NAPZA mendapat pelayanan kesehatan	Sidenreng Rappang	200 Orang	113.527.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang dengan masalah jiwa dan NAPZA mendapat pelayanan kesehatan	Sidenreng Rappang	200 Orang	113.527.500	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Sidenreng Rappang	14 PKM	5.000.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Sidenreng Rappang	14 PKM	5.000.000	

NO	REALISASI CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Sidenreng Rappang	17.919 orang	35.138.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Sidenreng Rappang	17.919 orang	35.138.000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat	Sidenreng Rappang	14.500 Orang	5.918.488.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat	Sidenreng Rappang	14.500 Orang	5.918.488.000	
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang mendapatkan pemeriksaan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Sidenreng Rappang	1.400 orang	29.000.000	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang mendapatkan pemeriksaan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Sidenreng Rappang	1.400 orang	29.000.000	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Puskesmas yang melakukan pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Sidenreng Rappang	14 PKM	10.000.000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Puskesmas yang melakukan pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Sidenreng Rappang	14 PKM	10.000.000	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Sidenreng Rappang	11 Kec.	4.040.000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Sidenreng Rappang	11 Kec.	4.040.000	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan/Puskesmas di Kabupaten yang sudah terakreditasi	Sidenreng Rappang	8 PKM	24.330.200	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan/Puskesmas di Kabupaten yang sudah terakreditasi	Sidenreng Rappang	8 PKM	24.330.200	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Puseksmas yang melakukan investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Sidenreng Rappang	14 PKM	122.842.200	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Puseksmas yang melakukan investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Sidenreng Rappang	14 PKM	122.842.200	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Sidenreng Rappang	14 PKM	50.000.000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Sidenreng Rappang	14 PKM	50.000.000	

NO	REALISASI CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah perangkat Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang tersedia	Sidenreng Rappang	17 Unit	10.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah perangkat Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang tersedia	Sidenreng Rappang	17 Unit	10.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		100%	75.925.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		100%	75.925.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Sidenreng Rappang	14 PKM 1 Dinkes	5.050.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Sidenreng Rappang	14 PKM 1 Dinkes	5.050.000	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang tersedia	Sidenreng Rappang	14 PKM 1 Dinkes	30.875.000	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang tersedia	Sidenreng Rappang	14 PKM 1 Dinkes	30.875.000	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang Mendapat Pembinaan dan Pengawasan		100%	20.000.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang Mendapat Pembinaan dan Pengawasan		100%	20.000.000	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Puskesmas yang melakukan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Sidenreng Rappang	14 Unit	20.000.000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Puskesmas yang melakukan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Sidenreng Rappang	14 Unit	20.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan		100%	249.567.900	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan		100%	249.567.900	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR di fasilitasi mendapatkan SIP		85%	33.510.000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR di fasilitasi mendapatkan SIP		85%	33.510.000	

NO	REALISASI CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehat	Jumlah tenaga kesehatan mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Sidenreng Rappang	400 Orang	33.510.000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehat	Jumlah tenaga kesehatan mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Sidenreng Rappang	400 Orang	33.510.000	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		100%	129.778.200	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		100%	129.778.200	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang di butuhkan dalam rangka distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan di fasilitas kesehatan	Sidenreng Rappang	50 orang	129.778.200	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang di butuhkan dalam rangka distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan di fasilitas kesehatan	Sidenreng Rappang	50 orang	129.778.200	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	86.279.700	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	86.279.700	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sidenreng Rappang	2.225 orang	86.279.700	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sidenreng Rappang	2.225 orang	86.279.700	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C .32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dusun II amessangeng, Kab. Sidenreng Rappang	MESIN FOGGING (ALAT SEMPROT NYAMUK)	1 Unit	Pengadaan /Pengembangan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Dusun I Larumpu, Kab. Sidenreng Rappang	Pemeliharaan Saran dan Prasarana PUSTU	1 Unit	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (PUSTU)
		Panreng Rijang & Panreng Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) terhadap kesehatan jiwa dan Bahaya NARKOBA	1 Unit	Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
		Lingkungan Cilellang dan Orai Salo, Kab. Sidenreng Rappang	Penyuluhan dan Pencegahan Penyakit Menular Terhadap Masyarakat	1 Unit	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		lingkungan 3 Wala & Lingkungan 7 botto libu, Kab. Sidenreng Rappang	Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) terhadap resiko Terinfeksi HIV	1 Unit	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		jl pendidikan lingkungan 2 salopalakka, Kab. Sidenreng Rappang	Pelayanan Kesehatan bergerak	1 Unit	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Makkawarue, Kab. Sidenreng Rappang	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS) di Masyarakat	1 Unit	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Dusun Mario, Kab. Sidenreng Rappang	Pelatihan Kader Posyandu	1 Unit	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2023**

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

A. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024

Dalam Program Pembangunan Kesehatan, Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Standar Nasional (berlaku Umum secara Nasional) maka seyogyanya semua Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten harus menjabarkan kembali Rencana Strategis Kementerian Kesehatan ini, menjadi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi dan kemudian dijabarkan kembali menjadi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten maupun kota, tentunya yang disesuaikan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi setempatnya.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020- 2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”*. Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka stunting pada balita

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk

mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

a. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

- 1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
- 2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- 3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- 4. Peningkatan sumber daya kesehatan
- 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

b. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut :

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
		Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		Terjaminnya pembiayaan kesehatan

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan dan penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Menurunnya diparitas status kesehatan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial	Masih tingginya angka kematian ibu (MMR), prevalensi gizi kurang dan gizi buruk, cakupan pertolongan persalinan masih rendah	- Kurangnya ketrampilan bidan dalam penanganan bayi baru lahir yang bermasalah - Terlambat penemuan kasus - Penanganan kasus belum adekuat - Orang tua kurang kooperatif	- Digalakkannya kemitraan bidan dan dukun - Pemantauan ketat melalui call centre dinas kesehatan - Adanya jampersal - Adanya PMT bagi gizi buruk - Pelaksanaan posyandu yang maksimal - Adanya Program keluarga sadar gizi
2	Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan standar Pelayanan Minimal	Dari beberapa Indikator SPM, Masih ada beberapa indicator yang belum mencapai standart	- Masih rendahnya kualitas pendidikan nakes - Terbatasnya jumlah dan jenis nakes dan Penyebaran yang belum merata - Kurangnya pembiayaan di bidang kes. - Kurangnya pemenuhan alat dan perbekalan kesehatan	- Adanya dana BOK dan JKN

B. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023

Renstra Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan satu misinya adalah akses pelayanan kesehatan. Dan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menjabarkannya dalam VISI “**Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif Dan Berkarakter**”

Misinya :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan perencanaan strategis dalam jangka waktu lima tahun adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter, dengan berdasarkan dengan tujuan strategis yang di jabarkan dalam sasaran strategis perencanaan jangka menengah yakni “meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”

Isu strategisnya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Pencegahan dan Pengendalian Pandemi Kesehatan
4. Pencapaian SPM dan Sustainable Development Goals (SDGs)
5. Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita Stunting
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Era Revolusi Industri 4.0 (Era Digital / Teknologi Informasi

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) DAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Salah satu indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah kondisi kesehatan masyarakatnya. Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 68,69 tahun pada tahun 2016 menjadi 69,15 tahun pada tahun 2019, dan pencapaian keseluruhan sasaran SDGs tahun 2025. Perubahan dibidang kesehatan diperlukan mengingat adanya fenomena utama yang mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan, antara lain Perubahan-perubahan mendasar pada dinamika kependudukan yang mendorong transisi demografis dan epidemiologi, tantangan global sebagai akibat kebijakan perdagangan bebas serta pesatnya revolusi dalam bidang informasi, telekomunikasi dan transparansi, temuantemuan substansial dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang membuka cakrawala baru dalam memandang proses hidup, sehat, sakit dan mati, perubahan lingkungan mempengaruhi derajat dan upaya kesehatan, demokratisasi disegala bidang yang menuntut pemberdayaan dan kemitraan dalam pembangunan kesehatan.

Memasuki abad ke 21 yang merupakan era persaingan bebas antar bangsa, sektor kesehatan harus mampu meningkatkan derajat kesehatan yang nantinya akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas tenaga kerja, dan pada akhirnya akan mempertajam daya saing bangsa. Oleh karena itu pembangunan kesehatan membutuhkan suatu perencanaan yang sesuai dengan kondisi, potensi permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Karena tujuan umum dari pembangunan kesehatan adalah terciptanya perilaku dan lingkungan yang sehat dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat yang mandiri dalam memelihara kesehatan, sehingga terbentuk sumber daya manusia yang sehat, kreatif dan produktif untuk menunjang pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pembangunan pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan dan berkualitas ditujukan pada perbaikan gizi, angka harapan hidup, penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Permasalahan lain yang sangat perlu diperhatikan dan terus dibudayakan adalah kebiasaan masyarakat untuk tetap hidup sehat, bersih serta peduli terhadap lingkungan tempat tinggal, penyediaan air bersih, jamban keluarga pembuangan sampah maupun limbah dan meningkatkan mutu lingkungan hidup masyarakat dalam mencapai kualitas sumber daya manusia yang prima. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai macam program dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Masalah keterbatasan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan merupakan tantangan yang harus segera diprioritaskan khususnya kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan dan gizi yaitu anak bayi, anak usia balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Selanjutnya untuk meningkatkan upaya pentingnya hidup sehat salah satu program yang harus dijalankan adalah peningkatan penggunaan air bersih untuk minum (air kemasan, leding, pompa sumur dalam, sumur terlindungi dan mata air terlindung).

Sasaran pembangunan kesehatan yang diinginkan pada masa yang akan datang adalah; meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatnya status gizi dan kesehatan masyarakat, terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat, dan tertanggulangnya wabah penyakit menular dan kejadian luar biasa, meningkatnya pembinaan dan pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya yang beredar dalam lingkungan masyarakat, meningkatnya manajemen pembangunan kesehatan, terwujudnya tenaga kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna dan tersedianya sarana dan prasarana dan dukungan logistik yang memadai.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Perhatian khusus

diberikan pelayanan kesehatan penduduk miskin, daerah tertinggal dan daerah bencana, dengan memperhatikan kesetaraan gender.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana kerja dengan berpedoman pada Rencana strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB. *Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan* dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan memperhatikan uraian diatas maka Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tidak lagi memasukkan visi dan misi karena mengikuti visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Oleh karena itu dalam hal ini setiap Perangkat Daerah harus menjabarkan perencanaan kerjanya langsung ke dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah pada penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

daerah RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023, yaitu :

Misi ke-1 (RPJMD) :

Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat

Tujuan (RPJMD) :

Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat

Sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD) :

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

Tujuan dalam rancangan awal RENJA ini diartikan sebagai suatu yang ingin dicapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok visi, sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.25

Dalam rangka mewujudkan tujuan RPJMD yakni Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat, maka ditetapkan tujuan utama berdasarkan urusan pemerintahan :

1. Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yaitu :
“*Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat*” yang optimal dengan indikator tujuan “*meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup*” bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yaitu “ *Mewujudkan keluarga berkualitas yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia* “ dengan indikator tujuan “ *Angka kelahiran Total /Total fertility Rate (TFR) Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang.*

B. Sasaran Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator

secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 1 (Satu) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang yakni tahun 2022.

1. Sasaran Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- a. *Sasaran 1 : Meningkatnya Kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat dengan indikator sasaran sebagai berikut :*
 - 1. Angka Kematian Ibu per 100. 000 kelahiran hidup
 - 2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
 - 3. Prevalensi Balita Gizi Kurang
 - 4. Persentase Balita Gizi Buruk
- b. *Sasaran 2 : Meningkatnya pencegahan & pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran sebagai berikut :*
 - 1. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang terinfeksi HIV)
 - 2. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
 - 3. Eliminasi malaria (kabupaten/kota)
- c. *Sasaran 3 : Meningkatnya Sumber Daya kesehatan dengan indikator sasaran sebagai berikut :*
 - 1. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi
 - 2. Persentase rumah sakit terakreditasi
 - 3. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar
 - 4. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial
 - 5. Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Sasaran Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

- a. *Sasaran 1 : Menurunnya Angka Kelahiran Total dengan indikator sasaran sebagai berikut :*
 - 1. Rata-rata jumlah anak perkeluarga
- b. *Sasaran 2 : Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi dengan indikator sasaran sebagai berikut :*
 - 1. Ratio Akseptor KB

Mengacu uraian di atas maka pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel TC- 3.2.a
Tujuan, Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dan Estmasi Maju Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE	
			2022	2023
1	2	3	7	8
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				
1. Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat		1. Usia Harapan Hidup (UHH)	69,98	70,04
	1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	2. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	205	194
		3. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	18,6	17,6
		4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	18,4	16
		5. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	14	13

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE	
			2022	2023
1	2	3	7	8
	2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	6 Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	< 1	< 1
		11. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	340	340
		12. Kejadian Malaria per 1000 orang.	1/1000	1/1000
	3. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	9. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	100	100
		10. Persentase rumah sakit terakreditasi	100	100
		11. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	83	83
		12. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	80	80
		13. Indeks Kepuasan masyarakat (%)	79	80

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE	
			2022	2023
1	2	3	7	8
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.		1. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	2,07	2,05
	1. Menurunnya Angka Kelahiran Total	2. Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	2,1	2
	2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern	3. Ratio Akseptor KB	55.89	56,28

Pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana tabel diatas diselaraskan dengan pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian kesehatan atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkesinambungan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2. Kegiatan

- 1) *Kegiatan 1* : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) *Kegiatan 2* : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- 3) *Kegiatan 03* : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) *Kegiatan 05 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
Sub Kegiatan
 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) *Kegiatan 06 : Administrasi Umum Perangkat Daerah*
Sub Kegiatan
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) *Kegiatan 08 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
Sub Kegiatan
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) *Kegiatan 09 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
Sub Kegiatan
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program dan Kegiatan Prioritas

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 - 1) *Kegiatan 01 : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*

Sub Kegiatan :

1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 2. Pembangunan Puskesmas
 3. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 4. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
 5. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 6. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 7. Pengadaan Obat, Vaksin
 8. Pengadaan Bahan Habis Pakai
 9. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan
 10. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2) *Kegiatan 02 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

17. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
 19. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 21. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
 22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 23. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 24. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
 25. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
 26. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 27. Operasional Pelayanan Puskesmas
 28. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 29. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
 30. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
 31. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
 32. Penyediaan dan Pengelolaan system penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)
- 3) *Kegiatan 03* : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
 2. Pengadaan alat dan perangkat system informasi kesehatan dan jaringan internet
- 4) *Kegiatan 04* : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

- 1) *Kegiatan 01* : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- 2) *Kegiatan 02* : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) *Kegiatan 03* : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

- 1) *Kegiatan 01* : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 2) *Kegiatan 02* : Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga.

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
2. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- 3) *Kegiatan 03* : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk

Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- 4) *Kegiatan 06* : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan :

1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

- 1) *Kegiatan 1* : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) *Kegiatan 2* : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- 3) *Kegiatan 3* : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

5. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

- 1) *Kegiatan 01* : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan :

1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
2. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
- 2) *Kegiatan 02* : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
3. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
4. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

6. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

- 1) *Kegiatan 01* : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
3. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
- 2) *Kegiatan 02* : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan

1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
2. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
3. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
4. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

3) *Kegiatan 03* : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 2. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
 3. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 4. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 5. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 6. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta HakHak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
 7. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 8. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
 9. Peningkatan Kesertaan KB Pria
- 4) *Kegiatan 04* : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB

Sub Kegiatan

1. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB
2. Pembinaan Terpadu Kampung KB

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

1) *Kegiatan 1* : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan

1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat

Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

2. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 3. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
 4. Sosialisasi IPK
 5. Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
- 2) *Kegiatan 2* : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan

1. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2023**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

1. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang kesehatan;
2. Keserasian dan keterpaduan pembangunan bidang kesehatan dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 dan hasil review Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2020;
3. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan.
2. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 8 program, 38 kegiatan dan 213 Sub kegiatan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sebesar Rp. 133.817.799.000,- yang bersumber dari dana APBN dan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Program dan kegiatan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana termuat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Table T-C.33.

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Dina Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Kb Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINKES)			104.833.128.254					101.641.022.496	
1.2.1.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kelengkapan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	55.575.559.754				100 Persen	50.966.393.720	
1.2.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	71.594.500				100 Persen	51.430.000	
1.2.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	4 Dokumen	4.985.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	6.180.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	45.662.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	70.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	4.076.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	7.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA- SKPD yang tersedia	1 Dokumen	5.046.500	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	7.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	4.056.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	7.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	4.017.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	6.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.752.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	11.250.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	47.978.406.454				100 Persen	44.960.853.520	
1.2.1.2.02. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	1 Dokumen	47.929.014.154	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	44.906.260.820	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.02. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun skpd yang tersedia	1 Dokumen	3.699.700	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.700.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.02. 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersedia	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Persen	1.500.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.02. 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD yang tersedia	15 Dokumen	44.192.600	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Dokumen	49.392.700	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Daftar inventaris Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	9.445.300				100 Persen	3.057.000	
1.2.1.2.03. 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersedia	1 Dokumen	1.418.500	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.03. 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersdia	1 Dokumen	5.026.800	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.03. 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 ASN	3.000.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 ASN	1.057.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan sarana dan Prasarana Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	145.750.400				100 Persen	147.552.000	
1.2.1.2.05. 5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	18.850.400	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peraturan Perundang - Undangan yang di sosialisasikan	2 Dokumen	126.900.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	147.552.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk kepentingan administrasi Kantor	100 Persen	521.159.100				100 Persen	367.571.900	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.1.2.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12 Jenis	2.310.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Jenis	894.400	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	15 Jenis	39.734.500	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Jenis	36.190.600	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.06. 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	26 Jenis	9.315.800	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Jenis	7.936.600	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.06. 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu/bulan ketersediann Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	19.812.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	7.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.06. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu/bulan ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	449.986.800	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	315.550.300	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	6.546.650.000				100 Persen	5.117.580.000	
1.2.1.2.08. 1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik kantor	12 Bulan	763.250.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	643.280.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.08. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	5.783.400.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	4.474.300.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Aset Pemerintah Daerah	100 Persen	302.554.000				100 Persen	318.349.300	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.1.2.09. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mendapatkan Anggaran Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Selama Satu tahun	245 Kendaraan	172.500.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		245 Kendaraan	172.500.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.09. 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan	345 Kendaraan	22.500.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		345 Kendaraan	22.500.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.09. 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Biaya Pemeliharaan	5 Mesin	80.145.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Mesin	84.407.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.09. 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapat biaya pemeliharaan/Rehabilitasi	4 Gedung	4.909.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Gedung	26.999.500	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.2.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi	3 Gedung	22.500.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	11.942.800	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	1500 Persen	47.570.031.700				1500 Persen	48.794.475.497	
1.2.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia	I Unit	33.662.965.000				I Unit	39.612.790.567	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.01.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang terbangun	1 Unit	25.165.353.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	10.100.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.01.2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terbangun	10 Unit	1.408.920.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	9.988.930.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.01.4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	5 Rumah Dinas	752.911.000	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		15 Persen	756.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia	160 Motor	1.100.000.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		160 Motor	7.807.448.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat tambahan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14 PKM	1.243.470.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Persen	5.862.141.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.01.16	Pengadaan Obat Vaksin	Jumlah Jenis Obat dan Vaksin yang tersedia	135 Jenis Obat	1.976.004.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		135 Jenis Obat	3.060.210.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis Bahan Habis Pakai yang tersedia	30 Jenis BHP	1.976.100.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Jenis BHP	1.995.861.567	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapat pemeliharaan	14 Sarana	19.100.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Persen	20.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/Alat Penunjang Medik	14 PKM	21.107.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 PKM	22.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	13.866.694.100				100 Persen	9.126.634.930	
1.2.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.932 ibu hamil	113.448.400	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Insentif Daerah		1500 Persen	55.803.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.644 Ibu Bersalin	27.473.000	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Insentif Daerah		1500 Persen	27.743.730	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.392 Bayi	36.960.000	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	10.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.852 Balita	36.780.000	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	10.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54.192 siswa	56.260.000	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	5.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	191.908 orang	19.458.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1500 Persen	19.458.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1500 jiwa	55.000.000	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 jiwa	55.550.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.810 Orang	25.000.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17.810 Orang	25.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.768 Orang	576.576.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.768 Orang	576.576.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	550 Orang	1.910.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		550 Orang	1.929.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan	160 orang	1.380.326.000	Kab. Sidenreng Rappang			15 Persen	1.380.326.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Rumah Data yang di bentuk di setiap Kampung KB	15 rumah data	157.311.500	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 rumah data	117.069.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Puskesmas pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang melakukan Pelayanan Kesehatan	14 PKM	10.000.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 PKM	10.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	40159 Orang	549.022.600	Kab. Sidenreng Rappang			15 Persen	55.550.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar	14 Puskesmas	25.865.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Persen	23.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Puskesmas	313.100.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Persen	310.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Rumah Tangga Berprilaku Hidup bersih dan Sehat	38700 RT	471.740.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38.700 RT	47.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 PKM	9.857.800	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Persen	5.050.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 PKM	58.165.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 PKM	58.165.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang dengan masalah jiwa dan NAPZA mendapat pelayanan kesehatan	200 Orang	113.527.500	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	113.527.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	14 PKM	40.930.900	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Persen	5.050.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17.919 orang	93.843.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Persen	35.138.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.500 Orang	8.336.812.600	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		15 Persen	5.918.488.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang mendapatkan pemeriksaan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	1400 orang	40.000.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1400 orang	20.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Puskesmas yang melakukan pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	14 PKM	10.000.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Persen	10.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	jumlah Kecamatan mengikuti program Kabupaten Sehat	11 Kec	300.000.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Kec	4.040.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	24.484.600	Kab. Sidenreng Rappang			0 Dokumen	20.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan/Puskesmas di Kabupaten yang sudah terakreditasi	5 PKM	800.000.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Persen	24.330.200	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.3	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Puseksmas yang melakukan investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	14 PKM	122.842.200	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Persen	122.842.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	14 Puskesmas	50.000.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Puskesmas	50.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah perangkat Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang tersedia	1 Unit	10.000.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Persen	10.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100 Persen	33.930.600					35.050.000	
1.2.2.2.03. 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 PKM 1 Dinkes	3.055.600	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Persen	5.050.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.03. 3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang tersedia	14 PKM 1 Dinkes	30.875.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Persen	30.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang Memdaapat Pembinaan dan Pengawasan	100 Persen	6.442.000				100 Persen	20.000.000	
1.2.2.2.03. 4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang tersedia	1 Rumusan	6.442.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Persen	20.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	80 Rasio	111.337.400				80 Rasio	249.587.160	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.3.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR di fasilitas mendapatkan SIP	90 Persen	5.831.400				80 Rasio	33.510.285	
1.2.3.2.01.2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	jumlah tenaga kesehatan mendapatkan pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	1350 orang	5.831.400	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1350 orang	33.510.285	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 Persen	19.208.300				80 Rasio	129.778.455	
1.2.3.2.02.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang di butuhkan dalam rangka distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan di fasilitas kesehatan	35 Orang	19.208.300	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Rasio	129.778.455	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.3.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	86.297.700				80 Rasio	86.298.420	
1.2.3.2.03. 1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8 Orang	86.297.700	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Rasio	86.298.420	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memiliki Izin	100 Persen	128.399.900				100 Persen	182.766.570	
1.2.4. 2.01	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	100 Persen	9.886.000				100 Persen	39.676.570	
1.2.4. 2.01. 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	115 Sarana	9.886.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	39.676.570	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.4. 2.02. 1	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapat sertifikat	100 Persen	36.570.000				100 Persen	36.360.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.4. 2.02. 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Pengendalian serta tindak lanjut Pengawasan	10 Sarana	17.400.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	17.170.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.4.2.02. 2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sarana Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Pengendalian serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan	10 Sarana	19.170.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	19.190.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.4. 2.03. 1	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat pengawasan dan sertifi kt Produksi pangan untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Persen	10.563.900				100 Persen	35.350.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.4. 2.03. 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga yang mendapat pengawasan dan sertifi kt Produksi pangan untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 PIRT	10.563.900	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industri Rumah Tangga dan Apotek	100 Persen	35.350.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.4. 2.04. 1	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang mendapat Pengawasan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	100 Persen	33.000.000				100 Persen	33.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.4. 2.04. 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang mendapat Pengawasan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	60 TPM	33.000.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	33.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.06.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat tindak lanjut pengawasan perizinan	100 Persen	38.380.000				100 Persen	38.380.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.06. 1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang mendapat pemeriksaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	100 PIRT	38.380.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	38.380.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	80 Persen	1.447.799.500				80 Persen	1.447.799.549	
1.2.5. 2.01	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100 Persen	832.460.000				80 Persen	832.460.000	
1.2.5.2.01. 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah puskesmas yang melakukan peningkatan upaya promosi kesehatan advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	14 puskesmas	832.460.000	Kab. Sidenreng Rappang	Pendapatan Pajak Daerah		14 puskesmas	832.460.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.5. 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah tangga yang menyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	100 Persen	309.665.500				80 Persen	309.665.549	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Bersih dan Sehat di masyarakat								
1.2.2. 2.02. 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Rumah Tangga yang menyelenggarakan promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat	38.700 RT	309.665.500	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38700 RT	309.665.549	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.5. 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen	305.674.000				80 Persen	305.674.000	
1.2.5.2.03. 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah peserta bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	140 UKBM	305.674.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		140 UKBM	305.674.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PKM AMPARITA)			2.037.874.000					4.036.777.500	
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD	100 Persen	1.241.526.000				100 Persen	1.800.000.000	
1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan layanan BLUD	100 Persen	1.241.526.000				100 Persen	1.800.000.000	
1.2.2. 2.1. 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.241.526.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	Pendapatan dari BLUD	ASN dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.800.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	1500 Persen	759.148.000				1500 Persen	2.162.677.500	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	759.148.000				1500 Persen	2.162.677.500	
1.2.2.2.02. 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1400 Ibu hamil	67.770.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1400 Ibu hamil	109.215.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	18.000.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Orang	18.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah pengelolaah pelayanan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1050 Orang	18.000.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1050 Orang	18.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2100 Orang	58.550.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2100 Orang	58.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3078 Orang	38.261.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		3078 Orang	42.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	43.200.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.02. 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	22.500.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	18.400.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	18.200.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	jumlah orang dengan gangguan jiwa berat	25024 Orang	10.800.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		25024 Orang	21.600.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	449 Orang	47.800.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		449 Orang	53.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100 Orang	24.300.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Orang	24.300.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25024 Orang	27.207.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		25024 Orang	94.603.500	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2040 Orang	28.700.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2040 Orang	28.700.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah kesehatan kerja dan olah raga yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1550 Orang	26.200.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1550 Orang	27.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah kesehatan lingkungan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25024 Orang	36.400.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		25024 Orang	32.800.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	27.100.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas melakukan Upaya Kesehatan Khusus	14 PKM	24.300.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 persen	24.300.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah penyakit menular dan tidak menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25024 Orang	111.500.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		25024 Orang	316.913.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah kegiatan operasional pelayanan kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4 kegiatan	70.360.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		4 kegiatan	41.520.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan investigasi awal kejadian yang tidak diharapkan	2000 Orang	21.600.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2000 Orang	10.800.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	80 Rasio	37.200.000				80 Rasio	37.200.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.3. 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 Persen	37.200.000				80 Rasio	37.200.000	
1.2.3.2.02. 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	jumlah tenaga kesehatan yang ikut perjanjian kontrak bok	4 Orang	37.200.000	WILAYAH KERJA PKM AMPARITA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		4 Orang	37.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PKM BELAWAE)			1.460.789.000					1.460.789.000	
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	1500 Persen	1.355.389.000				1500 Persen	1.355.389.000	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1500 Persen	1.355.389.000				1500 Persen	1.355.389.000	
1.2.2.2.02. 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100 Persen	102.650.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	102.650.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100 Persen	16.200.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	16.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah ibu bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	16.200.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	16.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.02. 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100 persen	61.800.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	61.800.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 Persen	80.550.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	80.550.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	97.200.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	43.200.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	5.400.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	5.400.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 Persen	5.400.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	5.400.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100 Persen	14.400.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	14.400.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100 Persen	5.400.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	5.400.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	cakupan pekayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa(KLB)	100 Persen	135.403.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	135.229.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Persen	75.000.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	75.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen	34.200.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	34.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 Persen	46.350.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	46.350.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Pelayanan Promosi kesehatan	100 Persen	27.600.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	27.600.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Persen	28.960.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 persen	29.134.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen	5.400.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 persen	5.400.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Khusus	100 Persen	113.400.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	113.400.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Persen	59.700.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	210.900.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	256.876.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	PAJAK ROKOK		100 Persen	256.876.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Persen	113.300.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	113.300.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan Pelayanan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen	5.400.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	5.400.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	80 Rasio	105.400.000				80 Rasio	105.400.000	
1.2.3.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 Persen	105.400.000				80 Rasio	105.400.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100 Persen	105.400.000	WILAYAH KERJA PKM BELAWAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	105.400.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PKM KULO)			1.200.024.000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			1.200.024.000	
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan BLUD	100 Persen	590.759.000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			590.759.000	
1.2.1. 21	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen	590.759.000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			590.759.000	
1.2.2. 2.1. 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	100 Persen	590.759.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	590.759.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	1500 Persen	561.265.000	PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	561.265.000	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	561.265.000	PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	561.265.000	
1.2.2. 2.02. 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	209 orang	30.878.500	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	32.078.500	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.02. 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	2.400.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	2.400.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	482 balita	17.600.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	17.600.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2296 siswa	18.700.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	18.700.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	17.600.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1974 orang	26.400.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	26.400.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	4.800.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	4.800.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	106 orang	9.600.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	9.600.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan sesuai standar	255 orang	11.000.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	11.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV	255 orang	13.200.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	13.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	268 kasus	46.026.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	49.626.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah orang dengan pelayanan kesehatan gizi masyarakat mendapat pelayanan sesuai standar	12567 orang	30.600.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	30.600.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sesuai standar	12567 orang	16.200.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	16.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar	12567 orang	10.600.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	10.600.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah orang yang mendapat pelayanan promosi kesehatan sesuai standar	2515 orang	13.500.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	13.500.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.02. 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan surveilans kesehatan sesuai standar	2 orang	800.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	800.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang dengan kesehatan jiwa dan NAPZA	29 orang	2.400.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	2.400.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan khusus sesuai standar	12567 orang	114.000.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12567 orang	114.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12567 orang	80.172.500	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12567 orang	107.172.500	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3 orang	400.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		3 orang	600.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terselenggaranya fungsi manajemen puskesmas	100 orang	83.688.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 orang	83.688.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1492 orang	3.500.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1492 orang	3.500.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	1500 Persen	48.000.000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			48.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.5. 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 Persen	48.000.000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			48.000.000	
1.2.5.2.03. 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	18 UKBM	48.000.000	WILAYAH KERJA PKM KULO	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		18 UKBM	48.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PKM PANGKAJENE)			2.911.875.000					648.419.000	
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan BLUD	100 Persen	2.012.481.000				100 Persen	0	
1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen	2.012.481.000				100 Persen	-	
1.2.2. 2.1. 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	2.012.481.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	Pendapatan dari BLUD		Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas Poliklinik Pustu Per Satuan Penduduk	1: 4.718 Rasio	899.394.000				1: 4.718 Rasio	648.419.000	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	899.394.000				1: 4.718 Rasio	648.419.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.02. 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	100 Persen	55.075.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	14.400.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Pada Bayi Baru Lahir	100 Persen	3.600.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Balita	100 Persen	40.800.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 Persen	73.700.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	46.200.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	39.600.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	13.200.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	13.200.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	16.000.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga Tuberkulosis	100 Persen	26.400.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko Terinfeksi HIV	100 Persen	16.500.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	16.500.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Masyarakat pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100 Persen	98.933.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	100.433.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Persen	12.000.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	27.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen	22.200.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	22.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100Rumah BerPHBS	39.900.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	39.900.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Persen	85.100.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	85.100.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	100 Persen	6.000.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	22.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Kegiatan PIS PK	100 Persen	51.400.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Persen	76.900.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	186.800.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	100 Persen	145.886.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	145.886.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Investigasi Awal Kejadian tidak di Harapkan (KIPi dan POPM)	100 Persen	2.400.000	WILAYAH KERJA PKM PANGKAJENE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	2.400.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PKM LAWAWOI)			2.406.760.000					2.432.355.080	
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas Poliklinik Pustu Per Satuan Penduduk	1: 4.718 Rasio	2.372.660.000				1: 4.718 Rasio	2.397.914.080	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.372.660.000				1: 4.718 Rasio	2.397.914.080	
1.2.2.2.02. 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	634 Orang	41.750.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		634 Orang	42.167.500	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	17.000.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Orang	17.170.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	576 Orang	5.000.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		576 Orang	5.050.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2320 Orang	54.800.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2320 Orang	55.348.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5568 Orang	42.900.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		5568 Orang	43.329.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25332 Orang	13.200.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		25332 Orang	13.332.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5231 Orang	41.000.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		5231 Orang	41.410.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2323 Orang	11.000.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2323 Orang	11.110.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	367 Orang	9.000.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		367 Orang	6.060.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Oarng dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 Orang	4.000.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		65 Orang	5.050.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan TB yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	673 Orang	29.000.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		673 Orang	29.290.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	962 Orang	10.000.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		962 Orang	11.110.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Orang.Kelompok/Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan Pada Kondisi KLB	10 Desa/Kelurahan	100.565.500	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		10 Desa/Kelurahan	107.078.180	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita Yang Memiliki gangguan Pertumbuhan/bermasalah Status Gizinya mendapatkan Pelayanan Kesehatan	45 Orang /31posyandu	24.400.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		45 Orang	21.614.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Orang/Kelompok yang memperoleh pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga di wilayah Kerja Puskesmas	10 Desa/Kelurahan	18.600.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		10 Desa/Kelurahan	18.786.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Desa/Kelurahan	42.000.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		10 Desa/Kelurahan	42.420.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Posyandu yang mendapatkan Pembinaan	31 Posyandu	13.200.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		31 Posyandu	13.332.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Kelompok mendapatkan Konseling Jiwa dan NAPZA	44 Kelompok	10.600.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		44 Kelompok	10.706.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pelayanan PIS PK	10 Desa/Kelurahan	76.000.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		10 Desa/Kelurahan	96.960.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan Koordinasi/ Advokasi terkait Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10 Desa/Kelurahan 24 sekolah	183.100.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		10 Desa/Kelurahan	184.931.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 orang	1.564.252.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	PAJAK ROKOK		1: 4.718 Rasio	1.564.252.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program dalam upaya Kesehatan Masyarakat	16 Kali	61.292.500	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		16 Kali	57.408.400	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	80 Rasio	34.100.000				80 Rasio	34.441.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.3. 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 Persen	34.100.000				80 Rasio	34.441.000	
1.2.2. 2.02. 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapat Perjanjian Kerja	1 Orang	34.100.000	WILAYAH KERJA PKM LAWAWOI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Orang	34.441.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PKM MANISA)			1.057.846.000					537.494.730	
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas Poliklinik Pustu Per Satuan Penduduk	1: 4.718 Rasio	1.020.646.000				1: 4.718 Rasio	499.922.730	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.020.646.000				1: 4.718 Rasio	499.922.730	
1.2.2.2.02. 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen	6.050.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 persen	13.503.700	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 Orang	6.800.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	6.868.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	7.320.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	6.690.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	6.756.900	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1500 Orang	14.000.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	17.877.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	3.700.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	28.800.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	41.000.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	13.000.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	7.200.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	7.272.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	5.700.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	5.700.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	60 Orang	87.313.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	88.186.130	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200 Orang	48.500.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	48.985.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah kesehatan kerja dan olah raga yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 Orang	4.500.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	4.545.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan lingkungan	180 Orang	14.400.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	14.544.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	60 Orang	9.600.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	9.696.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas melakukan Upaya Kesehatan Khusus	70 Orang	30.000.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	84.840.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah penyakit menular dan tidak menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80 Orang	94.200.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	135.744.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	525.673.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	PAJAK ROKOK		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah kegiatan operasional pelayanan kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	60.500.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	61.105.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	80 Rasio	37.200.000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		80 Rasio	37.572.000	
1.2.3. 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 Persen	37.200.000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		80 Rasio	37.572.000	
1.2.2. 2.02. 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	jumlah tenaga kesehatan yang ikut perjanjian kontrak bok	1 Orang	37.200.000	WILAYAH KERJA PKM MANISA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		80 Rasio	37.572.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PKM BILOKKA)			1.700.327.000					3.500.327.000	
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan BLUD	100 persen	861.459.000				100 persen	1.800.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.1. 21	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	100 persen	861.459.000				100 persen	1.800.000.000	
1.2.1.2.1. 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	861.459.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	Pendapatan dari BLUD		0 Unit Kerja	1.800.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas Poliklinik Pustu Per Satuan Penduduk	1: 4.718 Rasio	838.868.000				1: 4.718 Rasio	1.700.327.000	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	838.868.000				1: 4.718 Rasio	1.700.327.000	
1.2.2.2.02. 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 Persen	79.150.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	79.150.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 Persen	5.000.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	5.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 Persen	5.000.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	5.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 Persen	119.950.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	119.950.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 Persen	34.000.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	34.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 Persen	38.850.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	38.850.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar	100 Persen	23.100.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	23.100.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	5.000.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	5.000.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 Persen	39.300.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	39.300.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 Persen	17.850.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	17.850.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar	100 Persen	40.650.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	40.650.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan penduduk pada kondisi kejadian luar biasa sesuai standar	100 Persen	116.188.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	126.188.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan gizi masyarakat sesuai standar	100 Persen	8.800.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	8.800.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan kerja dan olahragasuai standar	100 Persen	22.200.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	22.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar	100 Persen	30.150.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	30.150.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya capaian pelayanan promosi kesehatan sesuai standar	100 Persen	38.200.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	38.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan jiwa dan napza sesuai standar	100 Persen	13.850.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	13.850.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan khusus sesuai standar	100 Persen	21.000.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	21.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menularsesuai standar	100 Persen	48.350.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	48.350.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya capaian operasional pelayanan puskesmas sesuai standar	100 Persen	104.180.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	104.180.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Meningkatnya capaian investigasi awal kejadian tidak diharapkan sesuai standar	100 Persen	23.100.000	WILAYAH KERJA PKM BILOKKA	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	23.100.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PKM LANCIRANG)			1.211.304.000					1.223.416.240	
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas Poliklinik Pustu Per Satuan Penduduk	1: 4.718 Rasio	1.174.104.000				1: 4.718 Rasio	1.185.844.240	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1500 Persen	1.174.104.000				1: 4.718 Rasio	1.185.844.240	
1.2.2. 2.02. 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	26.010.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	26.270.100	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	18.000.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	18.180.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	6.000.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	6.060.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.02. 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	38.000.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	38.380.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak sekolah usia Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	20.600.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	20.806.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	43.800.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan kesehatan Pada Usia Lanjut	100 Persen	32.400.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	32.724.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	100 Persen	6.000.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	6.060.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	100 Persen	6.000.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	6.060.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan Jiwa sesuai standar	100 Persen	3.000.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	3.030.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	12.000.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	12.120.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan resiko Terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	10.000.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	10.100.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Orang.Kelompok/Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan Pada Kondisi KLB	100 Persen	64.691.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	65.236.910	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan gizi di wilayah kerja Puskesmas	100 Persen	20.400.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	20.604.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di wilayah Kerja Puskesmas	100 Persen	11.600.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	11.716.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Tempat Pengolahan Pangan dan Sarana Air Minum yang memenuhi syarat	100 Persen	12.000.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	12.120.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kelompok Masyarakat/Tokoh Masyarakat yang melakukan GERMAS melalui aktivitas Fisik	100 Persen	12.000.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	12.726.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Kesehatan di wilayah Kerja Puskesmas dalam Rangka Upaya pencegahan penyebaran penyakit	100 Persen	5.000.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	5.050.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen	11.000.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	11.110.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.02. 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan Pelayanan Upaya Kesehatan Khusus	100 Persen	39.600.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	39.996.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Persen	86.400.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	130.997.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	6 Desa/Kel	645.523.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	PAJAK ROKOK		6 Desa/Kel	651.978.230	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor dan Lintas Program dalam Upaya Kesehatan Masyarakat	100 Persen	44.080.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	44.520.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	80 Rasio	37.200.000				80 Rasio	37.572.000	
1.2.3. 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	37.200.000				80 Rasio	37.572.000	
1.2.2. 2.02. 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai Standar	100 Persen	37.200.000	WILAYAH KERJA PKM LANCIRAN	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	37.572.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PKM BARANTI)			1.528.824.000					1.544.112.240	
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas Poliklinik Pustu Per Satuan Penduduk	1: 4.718 Rasio	1.491.624.000				1: 4.718 Rasio	1.506.540.240	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.491.624.000				1: 4.718 Rasio	1.506.540.240	
1.2.2.2.02. 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil yang mendapat pelayanan sesuai standar	300 ibu hamil	48.870.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		300 ibu hamil	49.358.700	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	287 ibu bersalin	4.800.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		287 ibu bersalin	4.848.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	273 bayi	10.800.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		273 bayi	10.908.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan Balita	1518 balita	19.200.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1518 balita	19.392.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %	38.100.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 %	38.481.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	44.000.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	2742 orang	44.000.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2742 orang	55.550.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	11.000.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	11.000.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	2.400.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan pelayanan kesehatan dengan orang terduga tuberkulosis	100 %	10.800.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 %	10.908.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan pelayanan kesehatan dengan orang resiko terinfeksi HIV	100 %	7.200.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 %	7.272.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	100 %	84.708.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 %	85.555.080	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.02. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	cakupan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	100 %	53.200.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 %	53.732.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	cakupan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	100 %	30.600.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 %	30.906.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	cakupan pelayanan kesehatan lingkungan	100 %	13.200.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 %	15.756.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	cakupan pelayanan promosi kesehatan	100 %	22.600.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 %	22.826.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	cakupan pelayanan kesehatan surveilans	100 %	4.800.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 %	4.848.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100 %	12.000.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 %	12.120.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	cakupan pelayanan kesehatan khusus	100 %	39.600.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 %	39.996.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	cakupan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	100 %	125.600.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 %	182.406.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	cakupan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	100 %	790.426.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	PAJAK ROKOK		100 %	798.330.260	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	cakupan pelayanan operasional pelayanan Pukesmas	100 orang	59.120.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 orang	59.711.200	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	cakupan pelayanan investigasi awal kejadian tidak diharapkan (KIPI)	100 %	3.600.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 %	3.636.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	80 Rasio	37.200.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		80 Rasio	37.572.000	
1.2.3. 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 persen	37.200.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		80 Rasio	37.572.000	
1.2.2. 2.02. 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	cakupan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sesuai standar	1 petugas	37.200.000	WILAYAH KERJA PKM BARANTI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 petugas	37.572.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PKM BARUKKU)			2.195.310.000					2.016.260.000	
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas Poliklinik Pustu Per Satuan Penduduk	1: 4.718 Rasio	2.127.110.000				1: 4.718 Rasio	1.948.060.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.127.110.000					1.948.060.000	
1.2.2.2.02. 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	182.050.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu Bersalin sesuai standar	271 orang	24.300.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		271 orang	24.300.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Meningkatnya pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	258 orang	39.600.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		258 orang	39.600.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	1431 orang	144.700.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1431 orang	147.700.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	3217 orang	39.900.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		3217 orang	39.900.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	41.400.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Meningkatnya pelayanan kesehatan Usia Lanjut sesuai standar	2585 orang	18.600.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2585 orang	18.600.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.02. 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	13.800.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	13.800.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Meningkatnya pelayanan kesehatan Diabetes Melitus sesuai standar	19471 orang	10.200.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		19471 orang	10.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	25.800.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Meningkatnya pelayanan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	17471 orang	54.300.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		17471 orang	54.300.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Meningkatnya pelayanan kesehatan HIV/AIDS sesuai standar	19471 orang	49.500.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		19471 orang	49.500.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	19471 orang	166.262.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		19471 orang	166.262.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat sesuai standar	19471 orang	100.375.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		19471 orang	100.375.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya pelayanan kesehatan Lingkungan sesuai standar	19471 orang	35.900.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		19471 orang	35.900.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan Promosi Kesehatan sesuai standar	19471 orang	105.850.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		19471 orang	105.850.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya pelayanan Surveilans Kesehatan sesuai standar	19471 orang	20.400.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		19471 orang	20.400.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Meningkatnya pelayanan upaya kesehatan Khusus sesuai standar	19471 orang	129.600.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		19471 orang	129.600.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar	19471 orang	132.100.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		19471 orang	173.500.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen	718.473.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	Pajak Rokok - Pembayaran Iuran JKN		1: 4.718 Rasio	718.473.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan Operasional Puskesmas sesuai standar	100 orang	66.800.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 orang	66.800.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Meningkatnya pelayanan investigasi awal kejadian tidak di harapkan pasca imunisasi dan pemberian obat sesuai standar	271 orang	7.200.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		271 orang	7.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	80 Rasio	68.200.000				80 Rasio	68.200.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.3. 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1500 Persen	68.200.000				80 Rasio	68.200.000	
1.2.3.2.02. 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sesuai standar	100 Persen	68.200.000	WILAYAH KERJA PKM BARUKKU	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	68.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PKM DONGI)			1.424.599.000					1.438.844.990	
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas Poliklinik Pustu Per Satuan Penduduk	1: 4.718 Rasio	1.387.399.000				1: 4.718 Rasio	1.363.700.990	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.387.399.000				1: 4.718 Rasio	1.363.700.990	
1.2.2.2.02. 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	44.038.500	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	44.478.885	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah Ibu bersalin yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	9.050.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	9.140.500	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	1.650.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	1.666.500	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah Balita yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	71.580.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	72.295.800	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	8.250.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	8.332.500	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	13.000.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah usia lanjut yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	18.200.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	18.382.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	13.000.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	10.700.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	7.000.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	jumlah orang Penderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	13.000.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	13.130.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar	100 Persen	19.500.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	19.695.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Kondisi Kejadian Luar Biasa sesuai standar	100 Persen	72.461.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	73.185.610	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar	100 Persen	35.900.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	36.259.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan kebugaran jasmani sesuai standar	100 Persen	36.704.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	37.071.040	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan tentang kesehatan lingkungan sesuai standar	100 Persen	31.850.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	32.168.500	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan Promosi Kesehatan sesuai standar	100 Persen	42.520.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	49.510.200	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 Persen	13.000.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	13.130.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Keluarga Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan	100 Persen	21.450.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	21.664.500	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 Persen	125.476.500	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	126.731.265	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7908 orang	678.961.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7908 orang	685.750.610	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan opsional Puskesmas	100 Persen	79.608.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	80.404.080	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 Persen	20.500.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	20.705.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	80 Rasio	37.200.000				80 Rasio	75.144.000	
1.2.3. 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	37.200.000				80 Rasio	75.144.000	
1.2.3.2.02. 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	jumlah tenaga kesehatan yang sesuai kebutuhan	2 orang	37.200.000	WILAYAH KERJA PKM DONGI	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2 orang	75.144.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PKM TANRU TEDONG)			2.196.597.000					4.262.613.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1500 Persen	1.397.072.000					2.000.000.000	
1.2.1. 2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.397.072.000					2.000.000.000	
1.2.1.2.1. 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.397.072.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	Pendapatan dari BLUD		1 Unit Kerja	2.000.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas Poliklinik Pustu Per Satuan Penduduk	1: 4.718 Rasio	765.425.000				1: 4.718 Rasio	2.228.513.000	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	765.425.000				1: 4.718 Rasio	2.228.513.000	
1.2.2. 2.02. 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	521 orang	50.600.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		521 orang	62.950.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	5.500.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	5.500.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen	1.100.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	5.500.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 persen	96.800.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	113.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai STandar	100 Persen	38.500.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	36.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	26.400.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	26.400.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	16.500.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	16.500.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	11.000.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	11.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 persen	5.500.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	5.500.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	5.500.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	5.500.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga TB sesuai STandar	100 Persen	38.500.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	30.800.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Penderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 persen	30.800.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1: 4.718 Rasio	30.800.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Kondisi KLB sesuai STandar	100 Persen	11.000.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	87.334.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Sesuai Standar	100 Persen	31.900.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	29.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kerja dan Olahraga sesuai Standar	100 Persen	22.000.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	22.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan Sesuai Standar	100 Persen	53.900.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	53.100.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Promosi Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	58.300.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	23.100.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada surveilans Kesehatan	100 Persen	22.000.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	22.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	100 Persen	17.600.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	18.700.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan melalui Pendekatan Keluarga Indonesia Sehat sesuai standar	31591 orang	44.000.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		31591 orang	40.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar	2156 orang	83.100.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2156 orang	156.525.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	100 Persen	94.925.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	100.632.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	80 Rasio	34.100.000				80 Rasio	34.100.000	
1.2.3. 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			34.100.000					34.100.000	
1.2.2. 2.02. 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia sesuai standar	100 Persen	34.100.000	WILAYAH KERJA PKM TANRU TEDONG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	34.100.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PKM EMPAGAE)			1.381.480.900					1.390.481.000	
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas Poliklinik Pustu Per Satuan Penduduk	1: 4.718 Rasio	1.310.180.900				1: 4.718 Rasio	1.319.181.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.310.180.900				1: 4.718 Rasio	1.319.181.000	
1.2.2.2.02. 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Puskesmas	100 Persen	68.700.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	68.700.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Puskesmas	100 Persen	17.200.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	17.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Meningkatnya Pelayanan Bayi Baru Lahir di Puskesmas	100 Persen	4.000.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	4.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita di Puskesmas	100 Persen	30.800.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	30.800.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 Persen	25.000.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	44.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	19.200.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE			0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Meningkatnya Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	100 Persen	8.000.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	8.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	6.400.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE			0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	1.600.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE			0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 persen	9.000.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE			1: 4.718 Rasio	9.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	9.600.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE			0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Meningkatnya Pelayanan kesehatan orang dengan resiko tinggi Terinfeksi HIV	100 Persen	9.600.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	9.600.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Meningkatnya Pelayanan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100 Persen	83.302.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	87.302.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat	100 Persen	4.800.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	4.800.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatnya Pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen	16.000.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	16.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.02. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya Pelayanan kesehatan lingkungan	100 Persen	28.000.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	28.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Persen	52.800.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	52.800.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Surveilans kesehatan	100 Persen	8.000.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	5.600.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen	8.000.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	17.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Meningkatnya Pelayanan PIS PK	100 Persen	44.800.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	44.800.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya Pelayanan kesehatan penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Persen	68.450.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	84.450.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta JKN Puskesmas Empagae	9799 orang	737.928.900	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		9799 orang	737.929.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya Pelayanan Puskesmas	100 Persen	45.000.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	45.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Meningkatnya Pelayanan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	100 Persen	4.000.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	4.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	80 Rasio	71.300.000				80 Rasio	71.300.000	
1.2.3. 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 Persen	71.300.000				80 Rasio	71.300.000	
1.2.2. 2.02. 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	71.300.000	WILAYAH KERJA PKM EMPAGAE	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	71.300.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PKM RAPPANG)			1.970.014.000					3.976.795.970	
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan BLUD	100 Persen	1.237.209.000				100 Persen	2.000.000.000	
1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen	1.237.209.000				100 Persen	2.000.000.000	
1.2.1.2.1. 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.237.209.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	Pendapatan dari BLUD		1 Unit Kerja	2.000.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	1500 Persen	732.805.000				1500 Persen	1.939.223.970	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	732.805.000				1500 Persen	1.939.223.970	
1.2.2.2.02. 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	54.805.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	123.691.670	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	6.000.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	6.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	31.200.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	31.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	115.580.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	115.580.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.300 Orang	52.900.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	23.634.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	93.300.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	26.400.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	2.434.100	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	6.600.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	6.600.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	6.600.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	6.600.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	1.200.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	1.200.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan	160 Orang	10.000.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	16.160.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	10.000.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Orang	10.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan	100 Orang	53.900.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	74.800.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 15	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 pkm	24.000.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	87.466.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2. 2.02. 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah masyarakat Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Orang	14.400.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	27.068.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan lingkungan	25024 Orang	44.400.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	44.844.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	23.100.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	23.331.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 pkm	24.000.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	24.240.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 persen	11.000.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	11.110.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Orang	70.300.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	198.768.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2. 2.02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan biaya Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Orang	51.520.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Persen	44.468.200	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.2.02. 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1.600.000	WILAYAH KERJA PKM RAPPANG	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Laporan	1.600.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2. 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA			4.301.046.846					218.437.750	
2.14.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-Rata Anak Per Keluarga Pasangan Usia Subur	2.0 Jiwa	215.822.500				2.0 Jiwa	-	
2.14.2.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan OPD yang terlibat dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	100 Persen	53.630.900				2.0 Jiwa	0	
2.14.2.2.01. 1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah OPD yang terlibat dalam Keserasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	26 OPD	3.131.300	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 OPD	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.2.2.01. 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah OPD yang terlibat dalam Keserasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	26 OPD	50.499.600	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 OPD	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.14.2.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten	100 Persen	162.191.600				100 Persen	0	
2.14.2.2.02. 9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pertemuan tentang ProgramSistem informasi keluarga (SIGA)	1 kali	42.066.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 kali	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.2.2.02. 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	jumlah Dokumen pencatatan data keluarga danpengumpulan Data Keluarga yang tersedia	1 Dokumen	5.100.500	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.2.2.02. 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	jumlah dokumen dalam pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB yang tersedia	1 Dokumen	115.025.100	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS Peserta KB Aktif	9000 Persen	4.068.137.346				9000 Persen	218.437.750	
2.14.3.2.01	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 Persen	775.586.900				9000 Persen	218.437.750	
2.14.3.2.01.1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Balai KB yang memberikan advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	11 Balai KB	218.437.500	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		11 Balai KB	218.437.750	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.3.2.01.2	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Balai KB yang memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	11 Balai KB	96.439.400	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Balai KB	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.14.3.2.01.7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai KB yang mendapatkan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	11 Balai KB	460.710.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Balai KB	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.3.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 Persen	1.572.368.000					0	
2.14.3.2.02. 1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah PKB PLKB melakukan Pembinaan oleh penyuluh Lapangan KB (PLKB) terhadap kader IMP dan Program KKBPK	106 PKB	303.000.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		106 PKB	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.3.2.02. 2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Balai KB yang mendapatkan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	11 Balai KB	328.250.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Balai KB	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.3.2.02. 3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB yang mendapatkan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK	106 pkb	427.230.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		106 pkb	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.3.2.02. 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang dimanfaatkan dalam Program KKBPK	444 kader	513.888.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		444 kader	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.3.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitas kesehatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100 Persen	1.324.584.946				90 Persen	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.14.3.2.03.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17 faskes	7.771.500	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 faskes	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.3.2.03.2	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	17 faskes	247.449.600	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 faskes	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.3.2.03.3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang diberikan penyuluhan untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	43966 PUS	189.463.420	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		43966 PUS	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.3.2.03.6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang mendapatkan Sarana Penunjang Pelayanan KB	17 faskes	744.081.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 faskes	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.3.2.03.8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	17 faskes	9.537.500	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 faskes	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.3.2.03.9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	17 faskes	41.938.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 faskes	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.14.3.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	jumlah faskes yang mendapatkan peningkatan kompetensi & SDM tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	17 faskes	72.434.200	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 faskes	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.3.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Faskes yang mendapatkan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	17 faskes	2.002.726	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB		17 faskes	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.3.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Balai KB yang memberikan penyuluhan Kesertaan KB Pria (MOP)	11 Balai KB	9.907.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB		11 Balai KB	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.3.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Kader yang ikut dalam Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	100 Persen	395.597.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB		9000 Persen	0	
2.14.3.2.04.1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	jumlah kader yang mendapatkan pelatihan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB	454 kader	134.260.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB		454 kader	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.3.2.04.4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB Yang di jadikan lokasi pembinaan Terpadu Kampung KB	15 Kampung KB	261.337.500	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB		15 Kampung KB	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.14..4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	100 Persen	17.087.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- BOKB		100 Persen	0	
2.14.4.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan desa/Kelurahan yang ikutdalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga	100 Persen	1.515.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- BOKB		100 Persen	0	
2.14.4.2.01.1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah desa/kelurahan membentuk kelompok tribina dan UPPKS	106 Desa/Kel	303.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		106 Desa/Kel	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.4.2.01.7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah kelompok yang ditempati pelaksanaan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan keluarga & UPPKS	320 Kelompok	303.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		320 Kelompok	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.4.2.01.8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Kelompok yang di tempati pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	320 Kelompok	303.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		320 Kelompok	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.14.4.2.01.12	Sosialisasi IPK	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi IPK	11 Kecamatan	303.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Kecamatan	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.4.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah kecamatan yang melakukan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	11 Kecamatan	303.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Kecamatan	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.4.2.02.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kemasyarakatan yang ikut dalam pelaksanaan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100 Persen	15.572.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	0	
2.14.4.2.02.4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	jumlah kelompok yang mendapatkan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja (perayaan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Provinsi dan Pusat	320 Kelompok	15.572.000	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		320 Kelompok	0	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TOTAL				133.871.999.000					131.420.419.200	

BAB V

PENUTUP

RENCANA KERJA

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2023**

BAB V.

PENUTUP

Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dan Draft Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan kesehatan dan pengendalian penduduk tahun 2023.

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan awal Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program, kegiatan serta sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang kesehatan dan pengendalian penduduk yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, maupun APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
2. Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam pembangunan kesehatan
2. Perlunya komitmen kuat dalam pengawalan upaya-upaya pembangunan kesehatan dan Pengendalian penduduk yang masih memerlukan upaya keras
3. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terutama untuk pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan kesehatan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan dan pengendalian penduduk yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di bidang kesehatan dan pengendalian penduduk di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

[illegible]

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple sets of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting practice. The lines are light gray and extend across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

Rencana Kerja
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2023

di Editing
oleh
Bagian Perencanaan
Sekretariat
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2022

